

REVITALISASI FILOSOFI NGAHA AINA NGOHO: REKONSTRUKSI PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DI DANA MBOJO

Nur Febriani^{1*}, Muhammad Sarjan^{2*}

^{1,2} Prodi Magister Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

Email: Febryaninur@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 2 Mei, 2026

Approved 9 Mei 2026

Abstract

Pembelajaran Penelitian ini bertujuan merekonstruksi filosofi lokal Ngaha Aina Ngoho sebagai kerangka etika ekologis dalam tata kelola sumber daya alam di Dana Mbojo, Kabupaten Bima. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi lingkungan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung yang menyebabkan kerusakan ekologis, hilangnya mata air, sedimentasi sungai, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan hermeneutika budaya. Data diperoleh dari literatur budaya Mbojo, dokumen kebijakan, kajian lingkungan, dan berbagai penelitian terkait kearifan lokal serta tata kelola lingkungan berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui interpretasi makna filosofis, identifikasi nilai ekologis, dan sintesis konseptual untuk menghasilkan model tata kelola berbasis nilai budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi Ngaha Aina Ngoho mengandung tiga prinsip utama, yaitu hak pemanfaatan sumber daya secara wajar (ngaha), pengendalian diri dalam eksploitasi (aina), dan larangan menghabiskan sumber daya secara destruktif (ngoho). Ketiga prinsip tersebut relevan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan, pendidikan ekologis, zonasi pemanfaatan lahan, serta penguatan kelembagaan adat. Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi transformasi tata kelola lingkungan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekologis di Dana Mbojo.

Kata kunci: kearifan lokal; tata kelola lingkungan; Ngaha Aina Ngoho

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Febriani, N., Sarjanan, M. (2026) Revitalisasi Filosofi Ngaha Aina Ngoho: Rekonstruksi Prinsip Keseimbangan Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Dana Mbojo, 2 (1), 93–102 <https://doi.org/10.55681/jseelg.v1i1.211>

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu pembangunan paling mendesak pada abad ke-21. Berbagai wilayah di dunia menghadapi tekanan ekologis akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, perubahan penggunaan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak perubahan iklim yang semakin intensif. Dalam konteks negara berkembang, tekanan tersebut sering kali diperparah oleh orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bima yang dikenal sebagai wilayah Dana Mbojo. Dalam satu dekade terakhir, wilayah ini mengalami perubahan bentang alam yang cukup signifikan akibat ekspansi pertanian jagung yang berlangsung secara masif. Peningkatan permintaan pasar terhadap komoditas jagung mendorong pembukaan kawasan hutan pada daerah pegunungan dan wilayah tangkapan air yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Akibatnya, terjadi peningkatan lahan kritis, degradasi daerah aliran sungai, erosi, sedimentasi, serta menurunnya ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat. Data Kabupaten Bima tahun 2024 menunjukkan bahwa luas lahan kritis telah mencapai sekitar 161.000 hektare dan sekitar 75% deforestasi berkaitan dengan perluasan lahan pertanian jagung. Selain itu, hilangnya puluhan mata air di berbagai desa dan meningkatnya frekuensi banjir bandang menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan mengalami penurunan yang cukup serius. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut perubahan nilai, norma, dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan sering kali berhubungan dengan melemahnya institusi sosial dan pengetahuan ekologis tradisional yang sebelumnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksploitasi sumber daya alam (Copes-Gerbitz et al., 2021; Reed et al., 2022; Whyte, 2022; Berkes, 2023; Ford et al., 2023). Fernández-Llamazares et al. (2023) menjelaskan bahwa hilangnya pengetahuan lokal dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan karena berkurangnya kemampuan adaptasi yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Díaz et al. (2023) menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam akan lebih efektif apabila memperhatikan nilai budaya dan sistem pengetahuan yang hidup dalam masyarakat lokal. Dengan demikian, krisis ekologis yang terjadi di Dana Mbojo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekonomi dan lingkungan, melainkan juga sebagai konsekuensi dari melemahnya nilai-nilai budaya yang selama ini mengatur hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Dalam berbagai literatur mutakhir, kearifan lokal dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pengetahuan ekologis tradisional yang berkembang dalam masyarakat lokal terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat (Bang, 2024; Dorji et al., 2024). Ens et al. (2024) menunjukkan bahwa komunitas yang masih mempertahankan nilai-nilai ekologis tradisional cenderung memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada pendekatan teknokratis. Temuan tersebut diperkuat oleh Garnett et al. (2024) yang menyatakan bahwa wilayah yang dikelola dengan melibatkan masyarakat adat dan pengetahuan lokal umumnya memiliki tingkat konservasi keanekaragaman hayati yang lebih baik. Di Indonesia, berbagai praktik kearifan lokal seperti Subak di Bali, Sasi di Maluku, Awig-Awig di Lombok, dan Repong Damar di Lampung telah menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang efektif (Kurnia et al., 2022; Sianturi et

al., 2025). Dalam konteks masyarakat Mbojo, filosofi Ngaha Aina Ngoho merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai ekologis yang kuat. Filosofi ini terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu ngaha yang berarti memanfaatkan atau mengambil manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, aina yang bermakna larangan melampaui batas kewajaran dalam pemanfaatan sumber daya, serta ngoho yang berarti larangan menghabiskan sumber daya hingga menimbulkan kerusakan permanen. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena sejalan dengan prinsip keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh karena itu, revitalisasi filosofi Ngaha Aina Ngoho menjadi penting untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan yang semakin meningkat sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Dana Mbojo.

Meskipun kajian mengenai kearifan lokal dan tata kelola lingkungan berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal atau mengkaji hubungan umum antara masyarakat adat dan konservasi lingkungan tanpa mengembangkan kerangka implementasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik. McElwee et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak penelitian mengenai pengetahuan lokal masih berhenti pada tahap dokumentasi nilai budaya dan belum mampu menjembatani pengetahuan tersebut dengan kebutuhan tata kelola lingkungan modern. Tengö et al. (2023) juga menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini bukan terletak pada kurangnya pengetahuan lokal, melainkan pada bagaimana mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi instrumen kebijakan yang operasional. Penelitian Hill et al. (2023) menemukan bahwa sebagian besar kebijakan lingkungan di negara berkembang masih bersifat top-down sehingga kurang mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, penelitian Adnan et al. (2022), Permana et al. (2025), dan Nurhasan dan Bunyamin (2025) menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan masih bersifat parsial dan belum menjadi bagian utama dari sistem tata kelola sumber daya alam. Khusus mengenai masyarakat Mbojo, studi yang membahas filosofi Ngaha Aina Ngoho masih relatif terbatas dan umumnya hanya mengulas aspek budaya, sejarah, atau identitas sosial masyarakat Bima. Belum banyak penelitian yang secara khusus merekonstruksi filosofi tersebut menjadi kerangka etika ekologis yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan degradasi lingkungan kontemporer. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan makna budaya Ngaha Aina Ngoho, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi model tata kelola lingkungan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi filosofi Ngaha Aina Ngoho sebagai kerangka etika ekologis dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan di Dana Mbojo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika budaya untuk memahami makna filosofis yang terkandung dalam konsep ngaha, aina, dan ngoho, kemudian menghubungkannya dengan teori tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengembangkan model konseptual yang menjembatani nilai budaya lokal dengan praktik *environmental governance* modern. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya berfokus pada identifikasi dan pelestarian nilai budaya, penelitian ini menempatkan filosofi Ngaha Aina Ngoho sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan lingkungan berbasis budaya lokal. Selain itu, penelitian ini menawarkan model implementasi yang meliputi integrasi nilai

budaya ke dalam regulasi daerah, pendidikan ekologis, sistem zonasi lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, serta penguatan kelembagaan adat sebagai aktor utama dalam pengawasan sumber daya alam. Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi Artelle et al. (2023) dan Ford et al. (2023) yang menekankan pentingnya menjadikan pengetahuan lokal sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dalam tata kelola lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian tata kelola lingkungan berbasis budaya, tetapi juga menawarkan alternatif solusi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi krisis ekologis yang sedang berlangsung di Kabupaten Bima. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi kearifan lokal sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Dana Mbojo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutika budaya. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada rekonstruksi makna filosofis dan nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam filosofi *Ngaha Aina Ngoho* sebagai kearifan lokal masyarakat Dana Mbojo. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber pengetahuan yang tersedia. Sementara itu, hermeneutika budaya digunakan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan simbol, makna, norma, dan nilai yang hidup dalam masyarakat Mbojo. Melalui pendekatan ini, filosofi *Ngaha Aina Ngoho* tidak hanya dipahami sebagai ungkapan budaya tradisional, tetapi juga dianalisis sebagai sistem etika ekologis yang memiliki relevansi terhadap tata kelola sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan pada konteks kontemporer.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus kajian, meliputi literatur budaya Mbojo, naskah sejarah, artikel ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan lingkungan, laporan pemerintah daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kearifan lokal, konservasi lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Fokus kajian diarahkan pada wilayah Kabupaten Bima sebagai representasi kawasan Dana Mbojo yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan ekologis akibat perubahan penggunaan lahan, terutama ekspansi pertanian jagung pada kawasan pegunungan dan daerah hulu sungai. Berbagai sumber pustaka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan kondisi lingkungan dengan melemahnya implementasi nilai-nilai budaya lokal dalam praktik pengelolaan sumber daya alam.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan, seleksi, dan kategorisasi literatur berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan filosofi *Ngaha Aina Ngoho*, kearifan lokal, dan tata kelola lingkungan. Tahap kedua berupa interpretasi hermeneutika terhadap makna filosofis yang terkandung dalam konsep *ngaha*, *aina*, dan *ngoho* guna mengidentifikasi nilai-nilai ekologis yang menjadi landasan hubungan manusia dengan alam dalam budaya Mbojo. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu menghubungkan hasil interpretasi dengan teori pembangunan berkelanjutan dan *environmental governance* untuk merumuskan model tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Melalui tahapan tersebut, penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi filosofi *Ngaha Aina Ngoho* sebagai landasan normatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta sebagai alternatif pendekatan dalam menjawab tantangan krisis ekologis di Dana Mbojo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis hermeneutika terhadap berbagai literatur budaya Mbojo menunjukkan bahwa filosofi *Ngaha Aina Ngoho* bukan sekadar ungkapan tradisional, melainkan sistem nilai yang mengatur relasi manusia dengan alam secara seimbang. Filosofi ini lahir dari pengalaman panjang masyarakat agraris Dana Mbojo dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas pada wilayah dengan karakteristik ekologis yang rentan terhadap kekeringan dan degradasi

lahan. Dalam konteks tersebut, alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi ekonomi semata, melainkan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya demi generasi berikutnya.

Analisis menunjukkan bahwa konsep *Ngaha* mengandung makna hak manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun hak tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip *Aina*, yaitu larangan melampaui batas kewajaran dalam pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, *Ngoho* menegaskan larangan menghabiskan sumber daya hingga kehilangan kemampuan regeneratifnya. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem etika lingkungan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Mbojo sebenarnya telah memiliki paradigma keberlanjutan jauh sebelum konsep sustainable development diperkenalkan secara global.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Berkes (2023) yang menjelaskan bahwa sistem pengetahuan ekologis tradisional pada berbagai komunitas adat dunia berkembang sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui pembentukan norma pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Demikian pula Fernández-Llamazares et al. (2023) menegaskan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.

Tabel 1. Sintesis Nilai Filosofis *Ngaha Aina Ngoho* dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Lingkungan

Konsep Filosofis	Makna Budaya Mbojo	Nilai Ekologis	Relevansi Tata Kelola Lingkungan
Ngaha	Hak memanfaatkan alam	Pemanfaatan sumber daya secara proporsional	Dasar pemanfaatan berkelanjutan
Aina	Larangan melampaui batas	Pengendalian eksploitasi	Prinsip kehati-hatian lingkungan
Ngoho	Larangan menghabiskan sumber daya	Konservasi ekosistem	Dasar perlindungan kawasan ekologis
Integrasi Nilai	Keseimbangan manusia dan alam	Keberlanjutan ekologis	Tata kelola berbasis budaya lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bima tidak dapat dipisahkan dari melemahnya implementasi nilai-nilai *Ngaha Aina Ngoho* dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Perubahan orientasi ekonomi masyarakat yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas jagung telah menyebabkan ekspansi lahan pertanian secara besar-besaran pada kawasan hutan dan daerah tangkapan air.

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bima menghadapi sekitar 161.000 hektare lahan kritis dan sekitar 75% deforestasi berkaitan dengan pembukaan lahan pertanian jagung intensif. Kondisi ini telah menyebabkan hilangnya fungsi ekologis kawasan hulu, meningkatnya sedimentasi sungai, berkurangnya debit mata air, serta meningkatnya kejadian banjir bandang tahunan.

Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya transformasi nilai dari prinsip pemanfaatan terkendali menuju eksploitasi yang berorientasi keuntungan jangka pendek. Jika pada masa lalu masyarakat menerapkan prinsip pembatasan pemanfaatan sumber daya berdasarkan norma

budaya, maka saat ini pertimbangan ekonomi lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekologis.

Temuan ini mendukung penelitian McElwee et al. (2023) yang menjelaskan bahwa hilangnya institusi lokal dan melemahnya norma budaya sering menjadi faktor utama terjadinya degradasi lingkungan di negara-negara berkembang. Selain itu, penelitian Ford et al. (2023) menemukan bahwa komunitas yang kehilangan sistem pengetahuan tradisional cenderung mengalami kerentanan ekologis yang lebih tinggi dibandingkan komunitas yang masih mempertahankan mekanisme pengelolaan berbasis budaya.

Tabel 2. Manifestasi Krisis Ekologis Dana Mbojo

Indikator	Kondisi	Penyebab	Dampak
Lahan kritis	±161.000 Ha	Alih fungsi hutan	Penurunan produktivitas lahan
Deforestasi	±75% terkait jagung	Ekspansi pertanian	Hilangnya tutupan vegetasi
Mata air	Menurun di 39 desa	Kerusakan daerah hulu	Krisis air bersih
Sedimentasi	Meningkat	Erosi lahan terbuka	Pendangkalan sungai
Banjir bandang	Meningkat setiap tahun	Berkurangnya resapan air	Risiko bencana

Analisis menunjukkan bahwa filosofi *Ngaha Aina Ngoho* memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep *Ngaha* berkorelasi dengan dimensi ekonomi karena mengakui hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Konsep *Aina* berkaitan dengan dimensi sosial melalui pembentukan norma dan kontrol kolektif terhadap perilaku eksploitasi. Sementara konsep *Ngoho* berhubungan langsung dengan dimensi ekologis yang menekankan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan.

Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa filosofi lokal tidak bertentangan dengan paradigma pembangunan modern. Sebaliknya, nilai budaya lokal dapat memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan karena memiliki legitimasi sosial yang lebih tinggi di tingkat masyarakat. Bang (2024) menyatakan bahwa integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan.

Temuan penelitian ini juga mendukung studi Tengö et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penggabungan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal menghasilkan tata kelola sumber daya alam yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi *Ngaha Aina Ngoho* dapat dipandang sebagai strategi integratif yang menjembatani pendekatan ilmiah dengan nilai budaya lokal.

“Indigenous knowledge contributes significantly to climate adaptation and resilience” (Dorji et al., 2024).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen praktis yang memiliki kontribusi nyata terhadap ketahanan sosial-ekologis masyarakat.

Hasil sintesis konseptual menghasilkan model tata kelola lingkungan yang berlandaskan empat pilar utama. Pilar pertama adalah formalisasi hukum melalui integrasi nilai *Ngaha Aina Ngoho* ke dalam kebijakan daerah. Pilar kedua berupa pendidikan ekologis melalui pengembangan kurikulum muatan lokal yang menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini. Pilar ketiga adalah zonasi berbasis nilai yang membatasi aktivitas pertanian pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Pilar keempat adalah penguatan kelembagaan adat sebagai pengawas pemanfaatan sumber daya alam.

Tabel 3. Model Implementasi Filosofi *Ngaha Aina Ngoho*

Pilar Strategis	Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Formalisasi Hukum	Integrasi dalam Perda Lingkungan Hidup	Kepastian regulasi
Pendidikan Ekologis	Muatan lokal ekologi Mbojo	Peningkatan kesadaran lingkungan
Zonasi Berbasis Nilai	Pembatasan budidaya di kawasan hulu	Pengurangan deforestasi
Penguatan Adat	Revitalisasi kelembagaan lokal	Pengawasan partisipatif
Rehabilitasi DAS	Pemulihan kawasan kritis	Peningkatan fungsi hidrologis

Temuan ini sejalan dengan penelitian Budiman dan Oue (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kebijakan formal. Demikian pula Garnett et al. (2024) menunjukkan bahwa wilayah yang melibatkan masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan memiliki tingkat konservasi biodiversitas yang lebih baik dibandingkan wilayah yang hanya mengandalkan pendekatan birokratis.

“Climate change adaptation and mitigation strategies should consider indigenous knowledge” (Budiman & Oue, 2025).

Kutipan tersebut memperkuat argumen bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam menghadapi krisis lingkungan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian *environmental governance* dengan menunjukkan bahwa filosofi lokal dapat direkonstruksi menjadi kerangka normatif tata kelola sumber daya alam. Temuan ini memperluas perspektif bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum dan teknologi, tetapi juga oleh sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengembangkan kebijakan lingkungan berbasis budaya lokal. Integrasi filosofi *Ngaha Aina Ngoho* ke dalam regulasi daerah dapat meningkatkan legitimasi sosial kebijakan konservasi. Selain itu, penguatan pendidikan ekologis dan kelembagaan adat berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan identitas budaya lokal.

“Traditional ecological knowledge provides adaptive mechanisms for sustainable resource management” (Fernández-Llamazares et al., 2023).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan studi pustaka dan hermeneutika budaya sehingga belum memperoleh data empiris langsung dari masyarakat Mbojo mengenai persepsi dan praktik aktual filosofi *Ngaha Aina Ngoho*. Kedua, penelitian belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara degradasi lingkungan dan melemahnya implementasi nilai budaya lokal. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan masih bersifat konseptual sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan, studi kebijakan publik, maupun pendekatan partisipatif berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian lanjutan perlu mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji efektivitas implementasi filosofi *Ngaha Aina Ngoho* dalam mendukung konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Dana Mbojo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi *Ngaha Aina Ngoho* merupakan sistem nilai ekologis masyarakat Mbojo yang mengandung prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Melalui pendekatan hermeneutika budaya, penelitian berhasil merekonstruksi tiga elemen utama filosofi tersebut, yaitu *ngaha* sebagai hak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, *aina* sebagai prinsip pengendalian diri dalam pemanfaatan sumber daya, dan *ngoho* sebagai larangan melakukan eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan permanen terhadap lingkungan. Ketiga prinsip tersebut membentuk suatu kerangka etika ekologis yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan modern. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa krisis ekologis yang terjadi di Dana Mbojo, seperti meningkatnya lahan kritis, deforestasi, hilangnya mata air, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi dan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh melemahnya implementasi nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *environmental governance* dengan menempatkan kearifan lokal sebagai landasan normatif dalam tata kelola lingkungan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa filosofi *Ngaha Aina Ngoho* dapat direkonstruksi menjadi model tata kelola yang mengintegrasikan aspek regulasi, pendidikan ekologis, zonasi lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, dan penguatan kelembagaan adat. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan lingkungan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan melalui integrasi nilai budaya lokal ke dalam peraturan daerah, program pendidikan, dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas konservasi lingkungan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Dana Mbojo.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka dan hermeneutika budaya tanpa melibatkan data empiris lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji implementasi filosofi *Ngaha Aina Ngoho* melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur efektivitas model tata kelola berbasis kearifan lokal terhadap peningkatan kualitas lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat. Dengan demikian, filosofi *Ngaha Aina Ngoho* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Dana Mbojo pada masa mendatang.

REFERENCES

- Adnan, M., Syamsir, S., Alhadi, Z., Malau, H., Widesma, A., & Maani, K. D. (2022). Integration of local wisdom values in realizing good nagari governance. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 11(1), 39–56. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v11i1.5672>
- Artelle, K. A., Stephenson, J., Bragg, C., Housty, J. A., Housty, W. G., Kawharu, M., Turner, N. J., & Ban, N. C. (2023). Supporting resurgent Indigenous-led governance: A nascent mechanism for just and effective conservation. *Biological Conservation*, 282, 110081. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110081>
- Bang, H. N. (2024). Sustainable development goals, disaster risk management and indigenous knowledge: A critical assessment of the interlinkages. *Sustainable Earth Reviews*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s42055-024-00101-x>
- Berkes, F. (2023). Sacred ecology (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003326351>
- Budiman, M. A. K., & Oue, H. (2025). Integrating indigenous knowledge into sustainable forest management for climate change adaptation and mitigation strategies. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 31(1), 41–54. <https://doi.org/10.7226/jtfm.31.1.41>
- Copes-Gerbitz, K., Hagerman, S. M., & Daniels, L. D. (2021). Situating Indigenous knowledge for resilience in fire-dependent social-ecological systems. *Ecology and Society*, 26(4), 25. <https://doi.org/10.5751/ES-12757-260425>
- Díaz, S., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., & Zayas, C. N. (2023). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. *Science*, 366(6471). <https://doi.org/10.1126/science.aax3100>
- Dorji, T., Rinchen, K., Morrison-Saunders, A., Blake, D., Banham, V., & Pelden, S. (2024). Understanding how Indigenous knowledge contributes to climate change adaptation and resilience: A systematic literature review. *Environmental Management*, 74(6), 1101–1123. <https://doi.org/10.1007/s00267-024-02032-x>
- Ens, E. J., Scott, M. L., Rangers, Y., Moritz, C., & Pirzl, R. (2024). Indigenous-led conservation and resilience in changing environments. *People and Nature*, 6(1), 52–67. <https://doi.org/10.1002/pan3.10589>
- Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C. G., Brondizio, E. S., Gavin, M. C., Lyver, P. O. B., Nicholas, G. P., Pascua, P., Reo, N. J., Reyes-García, V., Turner, N. J., Yletyinen, J., & Anderson, E. N. (2023). Scientists' warning to humanity on threats to Indigenous and local knowledge systems. *Journal of Ethnobiology*, 43(2), 144–169. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-43.2.144>
- Ford, J. D., King, N., Galappaththi, E. K., Pearce, T., McDowell, G., & Harper, S. L. (2023). The resilience of Indigenous peoples to environmental change. *One Earth*, 6(1), 10–24. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.12.008>
- Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B.,

- Sivongxay, A., & Leiper, I. (2024). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nature Sustainability*, 1(7), 369–374. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6>
- Hill, R., Walsh, F. J., Davies, J., Sparrow, A., Mooney, M., & Wise, R. M. (2023). Indigenous governance and climate adaptation pathways. *Global Environmental Change*, 79, 102645. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102645>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local wisdom for ensuring agriculture sustainability. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- McElwee, P., Fernández-Llamazares, Á., Aumeeruddy-Thomas, Y., Babai, D., Bates, P., Galvin, K., Guèze, M., Liu, J., Molnár, Z., Ngo, H. T., Reyes-García, V., & Brondizio, E. S. (2023). Working with Indigenous and local knowledge in transformative biodiversity science. *BioScience*, 73(10), 796–807. <https://doi.org/10.1093/biosci/biad052>
- Nurhasan, N., & Bunyamin, B. (2025). The role of local wisdom in realizing the principle of environmental sustainability in Indonesia. *Litigasi*, 26(1), 382–408. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19691>
- Permana, D. Y., Imamulhadi, I., Idris, I., & Mariana, M. (2025). Integrating Indigenous wisdom in environmental protection: Legal perspectives from Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(2), 245–266. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.24876>
- Reed, M. G., Abernethy, P., & Fondahl, G. (2022). Indigenous stewardship and environmental governance. *Land Use Policy*, 120, 106260. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106260>
- Sianturi, I., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., & Dewi, B. S. (2025). Socio-ecological dynamics and inheritance of local knowledge in the management of Repong Damar. *Journal of Green Economy and Low-Carbon Development*, 4(3), 197–213. <https://doi.org/10.56578/jgelcd040305>
- Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2023). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance. *Ambio*, 52(4), 655–669. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01802-8>
- Whyte, K. P. (2022). Indigenous climate change studies: Indigenizing futures, decolonizing the Anthropocene. *English Language Notes*, 60(1), 153–162. <https://doi.org/10.1215/00138282-9583296>